**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Kinerja Keuangan Daerah**

**2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – uturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keungan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat – alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuanagan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja alam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

 Penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34) adalah “penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik”. Ada dua macam kinerja, yakni kinerja opeasional dan kinerja keuangan. Kinerja operasional lebih ditekankan pada kepentingan internal perusahaan seperti kinerja cabang/divisi yang diukur dengan kecepatan dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja keuangan lebih kepada evaluasi laporan keuangan perusahaan pada waktu dan jangka tertentu.

Menurut Halim (2013) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi, sedangkan rasio pertumbuhan dan keserasian tidak digunakan. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

**2.1.2 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang berbunyi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Undang – Undang no.32 tahun 2004, pasal 26 ayat (1) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat di jadikan milik daerah yang berhubungan dengan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Mamesah dalam Abdul Halim (2012), “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah memiliki unsur yaitu kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

**2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut susantih dan saftiana (2009) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber – sumber keuanagan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung bejalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana – dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas – batas yang ditentukan peraturan perundang – undangan.

Adapun menurut Sucipto (2005) menyatakan bahwa definisi “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangundangan selama satu periode anggaran.”

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”

Berdasarkan definisi maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuanagan pemerintah daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sesuai dengan aturan dan undang – undang yang berlaku.

**2.2 Rasio Kinerja Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaanya. Menurut Mohamad Mahsun (2012:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan.

Adapun rasio untuk menghitung kinerja keuangan sebagai berikut :

**2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat daerahnya (Halim 20013). Rasio kemandirian keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan

$KKD= \frac{Total Penerimaan PAD}{Total Bantuan Daerah dan Pinjaman}$ x 100

Menurut Purba (2012), untuk mengetahui hubungan situasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 2.1

Pola Hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Daerah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kemampuan Daerah** | **Rasio Kemandirian %** | **Pola Hubungan** |
| Rendah Sekali | 0-25 | Instruktif |
| Rendah | 25-50 | Konsultatif |
| Sedang | 50-75 | Partisifatif |
| Tinggi | 75-100 | Delegatif |

 Sumber : Purba, 2012

1. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusatsudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
	* 1. **Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD ini mengambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Menurut Mahsun (2012) rasio ini diukur dengan perbandingan :

$\frac{Realisasi Penerimaan PAD}{Target Penerimaan PAD}$ x 100

Tabel 2.2

Tingkat Efektivitas PAD

|  |  |
| --- | --- |
| **Efektivitas Keuangan Daerah** | **Rasio Efektivitas** |
| Efektif | >100% |
| Efektif berimbang | =100% |
| Tidak Efektif | <100% |

Sumber : Mashun, (2012)

* + 1. **Rasio Aktivitas**

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil. Formula pengukuran rasio ini diformulasikan seperti :

$Belanja Rutin= \frac{Total Belanja Rutin }{Total APBD}$x100

$Belanja Pembangunan= \frac{Total Belanja Pembangunan }{Total APBD}$x100

* + 1. **Rasio Efisiensi**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$RE=\frac{Realisasi Belanja Daerah}{Realisasi Pendapatan Daerah}x100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Efesiensi Kinerja Keuangan

|  |  |
| --- | --- |
| Kriteria Efisiensi | Persentase Efisiensi |
| >100% | Tidak Efisien |
| 100% | Efisien Berimbang |
| <100% | Efisien |

Sumber : Mashun (2012)

* + 1. **Rasio Pertumbuhan**

Menurut Halim (2013), rasio pertumbuhan (*Growht ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari period ke periode berikutnya.

Adapun Manfaat menurut Mahmudi (2010) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dihitung menggunakan formula :

$Pertumbuhan PAD=\frac{PAD\_{t-(t-1)}}{PAD\_{t-1}}$x100

$Pertumbuhan TPD=\frac{TPD\_{t-(t-1)}}{TPD\_{t-1}}$ x100

Pengukuran tingkat pengeluaran Daerah dapat diketahui melalui formula :

$Pertumbuhan Belanja Rutin=\frac{Belanja Rutin\_{t-(t-1)}}{Belanja Rutin\_{t-1}}$x100

$Pertumbuhan Belanja Pembangunan=\frac{Belanja Pembangunan\_{t-(t-1)}}{Belanja Pembangunan\_{t-1}}$x100

Dimana :

t = Tahun Berjalan

t-1 = Tahun Sebelumnya

**2.3 Penelitian Terdahulu**

Table 2.5

 Peneliti Terdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama peneliti** | **Judul penelitian** | **Hasil penelitian** |
|  | Lazyra KS (2016) | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuanagan Kota Medan | kinerja pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah KotaMedan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, rasio kemandirian yang masih dibawahstandar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintahdaerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yangdikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi daritarget. |
| 2 | Anim Rahmayati (2016) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015 | 1. Pendapatan Daerah selama Tahun 2012-2015, secara umum dapat dikatakan kurang baik,
2. Dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Dearah selama tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Surabaya dapat dikatakan sangat baik
3. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Surabaya masuk kedalam kategori tinggi dan pola hubungan deleglatif yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat rendah
 |
| 3 | Juddy Julian Pilat , Jenny Morasa (2016) | Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manadao Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015 | 1. Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kota Manado berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015 adalah sebesar 20,877%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado. Mengingat peran Pemerintah Pusat yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Manado masih kurang. Ini terlihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 5 tahun yaitu sebesar 17,240%. Artinya, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kota Manado. Namun, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Manado terbilang efektif dan sangat efisien. Ini terlihat dari tingginya nilai rata-rata Rasio Efektivitas yaitu sebesar99,864% dan rendahnya nilai rata-rata Rasio Efisiensi yaitu sebesar 0,835% selama periode 5 tahun anggaran. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa antar belanja tidak langsung dan belanja langsung belum seimbang. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung daripada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Manado masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan share dan growth terhadap LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh nilai rata-rataShare sebesar 18,792% dan rata-rata Growth sebesar 120,503%, sehingga posisi Kota Manado berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah Kota Manado masih harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga dapat lebih meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD. Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Manado selama periode 5 tahun, skala indeks menunjukkan angka 0,577 yang berarti kemampuan keuangan Kota Manado tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukkan pada analisis rasio kemandirian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.
 |
| 4 | Mega Oktavia Ropa (2016) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan | 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan efektifitas pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2011-2014 bisa dikategorikan Efektif. Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2011-2014 Kurang Efisien.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan kemandirian pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2011-2014 masih Rendah, Pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan aktifitas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2011-2014 masih rendah karena Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin/operasi dibandingkan untuk belanja pembangunan/modal.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan, sedangkan untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan masih kurang baik.
 |
| 5 | Anim Rahmayati (2014) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 | 1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal.
2. Efektivitas pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari 107,71% tahun 2011 menjadi 116,44% pada tahun 2012.
3. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 3,71% pada tahun 2011, 2,60% pada tahun 2012 dan 2,65% pada tahun 2013.
 |
| 6 | Putri Kemala Dewi Lubis dan Nurlia Hafni (2014) | Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 – 2013. | Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu dalam memenuhi dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah sekali berdasarkan kriteria penilaian kemandirian daerah menurut Kepmendagri karena berada pada interval 0-25%. Pada rasio aktivitas tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa Pemkab Labuhan Batu masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja ruitn dibandingkan belanja pembangunan. Pertumbuhan PAD pada tahun 2011-2013 menunjukkan kinerja Pemkab Labuhan Batu tidak baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang bernilai negatif. Pada rasio efektivitas PAD tahun 2011-2012 menunjukkan kinerja Pemkab Labuhan Batu yang sangat efektif tetapi pada tahun 2013 kinerja Pemkab Labuhan Batu tidak efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Pada rasio efisiensi PAD tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Labuhan Batu sangat efisien karena mampu menekan biaya-biaya yang ditimbulkan dari pemungutan PAD. Secara potensial apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Kabupaten Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena mempunyai DSCR diatas 250% setiap tahun. Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Pemkab Labuhan Batu dalam mengambil kebijakan belanja daerah. Karena memiliki ukuran dari kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusannya. |
| 7 | Msy. Mikial (2012) | Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin | Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sudah efektif. Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sebagian besar diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin dan sisanya baru diperuntukkan belanja pembangunan.  |
| 8 | Afriyanto (2012) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hulu | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun 2007-2011 masih sangat rendah, Rasio efektifitas kinerja keuangan tahun 2007 tidak efektif, tahun 2008 menunjukkan bahwa kinerja keuangan cukup efektif, tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif, dan tahun 2011menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif. Rasio efisiensi tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efisien karena di bawah angka 1%. Rasio aktivitas tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa rasio keserasian diprioritaskan untuk belanja rutin. Rasio Pertumbuhan APBD tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Karena mengalami kenaikan dan penurunan di tahun tertentu. |
| 9  | Joko Pramono (2012) | Analisis Rasio Keuanagan Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta) | * Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011).
* Pemkot Surakarta sangat efisien di dalam mengelola PAD nya, hal ini bisa di lihat dari hasil perhtingan rasio efisiensi sebesar 27,95% (2010) dan 14,15% (2011)
* Jumlah pendapatan dan jumlah PAD mengalami pertumbuhan yang positif, untuk pendapatan naik sebesar 19,92%, sedangkan PAD mengalami kenaikan cukup tinggi yakni sebesar 58,93%. Di lain pihak belanja operasi naik sebesar 14,58% dan belanja modal naik sangat tinggi sebesar 61,03%.
 |
| 10 | Wakhyudi dan Laila Firda Tarunasari (2010) | Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah | 1. Kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor didalam mengelola keuangan daerahnya sendiri masih rendah.
2. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa hambatan yaitu:
3. Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD hingga Perda Laporan Realisasi APBD setiap tahunnya belum tepat waktu dan penganggarannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian intern dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak lansung pada laporan keuangan.
5. Belum optimalnya sistem dan mekanisme data dan informasi perkembangan potensi pendapatan daerah dari setiap desa.
6. Ketergantungan pada dana ekstern yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat sering kali pencairannya terlambat.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik
 |

**2.4 Kerangka Pemikiran**

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Laporan Keuangan Pemerintah Daerrah

Analisis Kinerja Keuangan

Dengan rasio keuangan

Rasio Kemandirian

Rasio Pertumbuhan

Rasio Efisiensi

Rasio Aktivitas

Rasio Efektivitas

Kinerja Keuangan Daerah

 Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran di atas perhitungan pada rasio keuangan, pada perhitungan ini penulis menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang telah di dapat dari www.djpk.kemenkeu.go.id kemudian dihitung dengan menggunkan rasio keuangan sehingga akan menghasilkan hasil yang akan dibandingkan dengan standar yang ada.